



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 1986-2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi Syariah*

OLEH

**ENTI SERIANI SIREGAR
NIM: 13 230 0010**

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 1986-2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi Syariah*

OLEH

**ENTI SERIANI SIREGAR
NIM: 13 230 0010**

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 1986-2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi Syariah*

OLEH

ENTI SERIANI SIREGAR
NIM: 13 230 0010

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Zulaika Matondang, M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Enti Seriani Siregar**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 23 April 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

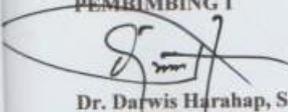
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Enti Seriani Siregar** yang berjudul "**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

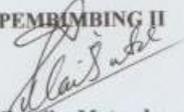
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Darwis Harahap, S.HL.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II


Zulaika Matondang, M.Si

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Enti Seriani Siregar
NIM : 13 230 0010
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbingan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa Pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 23 April 2018

Saya yang Menyatakan,




Enti Seriani Siregar
NIM. 13 230 0010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enti Seriani Siregar
Nim : 13 230 0010
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 23 April 2018
Yang Menyatakan,



Enti Seriani Siregar
NIM. 13 230 0010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : ENTI SERIANI SIREGAR
NIM : 13 230 0010
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
TERHADAP PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB) DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 1986-2015

Ketua

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.SI
NIP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris

Nofinawati, M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

Anggota

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.SI
NIP. 19780818 200901 1 015

Nofinawati, M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, M.M
NIP. 19811106 201503 1 001

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 31 Mei 2018
Pukul : 13.00 s/d 16.00 WIB
Hasil/ Nilai : 70,88 (B)
IPK : 3,32
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB) DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 1986-2015**

NAMA : ENTI SERIANI SIREGAR

NIM : 13 230 0010

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 5 Juli 2018

Dekan



Dr. Darwis Harahap, S.HL.,M.Si

NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : ENTI SERIANI SIREGAR

NIM : 13 230 0010

Judul : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015.

Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara. Hasil survei dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah dan PDRB di Sumatera Utara tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dapat juga mengalami penurunan. Pada tahun 1999 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan tetapi PDRB di provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan, begitu juga pada tahun 1989, tahun 2000 dan tahun 2014 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan tetapi PDRB di provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengeluaran pemerintah yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Teori PDRB yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder tahun 1986 sampai tahun 2015 di provinsi Sumatera Utara. Data diolah dengan menggunakan program Eviews 9 dengan pengujian statistiknya menggunakan data *time series*.

Berdasarkan hasil pengujian model regresi sederhana yang dilakukan dengan uji Normalitas. Data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan hasil pengujian uji t data *time series* menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($12.56381 > 2,0484$) yang artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil uji R^2 menunjukkan nilai sebesar 0.853935, menunjukkan bahwa variabel independen (pengeluaran pemerintah) berpengaruh sebesar 85,39 persen terhadap variabel dependen (PDRB).

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah AWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015”, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Jurusan Ekonomi Syariah, Konsentrasi Ilmu Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag Wakil Dekan bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, S.E., M.Si, selaku Ketua Prodi Jurusan Ekonomi Syari'ah, serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Zulaika Matondang M.Si, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa penghargaan dan terimakasih yang tak ternilai kepada keluarga tercinta, Ayahanda Sutan Guru Siregar dan Ibunda Siti Angan Harahap yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam setiap jejak langkah peneliti, pendamping dan penyejuk hati dan tidak pernah lelah mencurahkan kasih

sayangnya dengan tulus serta do'a untuk kesuksesan peneliti. Terimakasih juga kepada Abang Ahmad Muhajir Siregar, dan Asmil Ansor Siregar, kakak Nur Annisa Siregar dan Rodiah Nur Siregar, yang selalu setia member dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Tidak lupa juga kepada seluruh rekan mahasiswa seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah khususnya ES 1-IE angkatan 2013, yang selama ini telah berjuang bersama-sama.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungkapan terima kasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Peneliti, diterima di sisi-Nya dan dijadikan-Nya amal shaleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, juga peenliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, April

2018

Peneliti,

ENTI SERIANI SIREGAR
NIM. 13 230 0010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	Sad	ş	Es dan ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis diatas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Defenisi Operasional Variabel	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Kegunaan Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kerangka Teori.....	15
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
b. Indikator Menghitung Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2. Pengeluaran Pemerintah.....	23
a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah.....	23
b. Dasar Teori Pengeluaran Pemerintah.....	28
c. Kebijakan Pemerintah	33
d. Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah.....	34
e. Macam-Macam Pengeluaran Pemerintah	35
f. Fungsi Pengeluaran Pemerintah.....	38
g. Pengeluaran Pemerintah Dalam Islam	40

B. Penelitian Terdahulu	46
C. Kerangka Berfikir.....	50
D. Hipotesis.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
B. Jenis Penelitian.....	52
C. Populasi dan Sampel	53
a. Populasi	53
b. Sampel.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
a. Teknik Dokumentasi	54
b. Teknik Kepustakaan.....	55
E. Analisis Data	55
a. Uji Normalitas.....	55
b. Analisis Regresi Sederhana.....	56
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji t).....	57
d. Uji Signifikan Parsial (Uji R Square)	58
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	59
A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara.....	59
1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara	59
2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara.....	63
B. Deskripsi Data Penelitian.....	64
1. PDRB Provinsi Sumatera Utara	63
2. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	68
C. Hasil Analisis Data.....	72
1. Uji Normalitas	72
2. Hasil Estimasi Regresi	73
3. Uji t	75
4. R-Square (R^2).....	76
D. Pembahasan Hasil Penelitian	77
E. Keterbatasan Penelitian.....	79
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Pengeluaran Pemerintah dan PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015	5
Tabel I.2	: Defenisi Operasional Variabel	9
Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel IV.1	: Kabupaten/Kota dan Pusat Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara.....	62
Tabel IV.2	: PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015.....	65
Tabel IV.3	: Pengeluaran Pemerinrah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015	69
Tabel IV.4	: Uji Persamaan Regresi	74
Tabel IV.5	: Uji t.....	75
Tabel IV.6	: R Square (R2).....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	: Laju Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah	6
Gambar I.2	: Laju Pertumbuhan PDRB	7
Gambar II.1	: Kerangka Pikir	51
Gambar IV.1	: PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015	66
Gambar IV.2	: Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015.....	70
Gambar IV.3	: Uji Normalitas.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Data Pengeluaran Pemerintah dan PDRB di Sumatera Utara
- Lampiran 2 : Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 3 : Hasil Uji Persamaan Regresi
- Lampiran 4 : Hasil Uji t
- Lampiran 5 : Hasil Uji R Square (R^2)
- Lampiran 6 : Daftar t Tabel

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatan.¹

Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Ditinjau dari segi pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor didalam suatu Negara.²

Sebagai negara berkembang, pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi. Perubahan tingkat dan

¹Umdatul Husna, "Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota Se Jawa Tengah," (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2015), hlm. 1.

²Dumairy, *Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 1983), hlm. 118.

komposisi anggaran pemerintah baik pajak maupun pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan.

Sejak otonomi daerah dijalankan, maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang nyata, transparan, efektif dan efisien. Pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus mengacu pada ketiga dasar tersebut diperlukan biaya/anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di daerah dalam segala bidang, di samping itu pemerintah daerah harus berupaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, anggaran biaya untuk dekonsentrasi dan anggaran biaya tugas pembantuan.³

Pembelian pemerintah, atau secara lebih spesifik konsumsi dan investasi bruto pemerintah, mencakup belanja semua tingkat pemerintah barang dan jasa.⁴

³Harry A. P. Sitaniapessy, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD", dalam *Jurnal: Economia*, hlm. 38-39.

⁴William A. McEachern, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 148.

Penerimaan Kabupaten/Kota yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah lainnya, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bahkan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dalam pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting, karena dapat dipergunakan sebagai dana untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka tiap daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan yang berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah lainnya.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.

Penelitian ini lebih difokuskan pada pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengeluaran Pemerintah lebih mempunyai hubungan yang kuat dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi karena belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi *agent of development* dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena adanya kenaikan *output secara agregat*.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu, pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2015 sebesar 157.632.900 juta. Jika dibandingkan antar provinsi di Pulau Sumatera, maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Provinsi Riau. Peranannya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pulau Sumatera tahun 2015 sebesar 7,6 persen, sedangkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 4,95 persen.

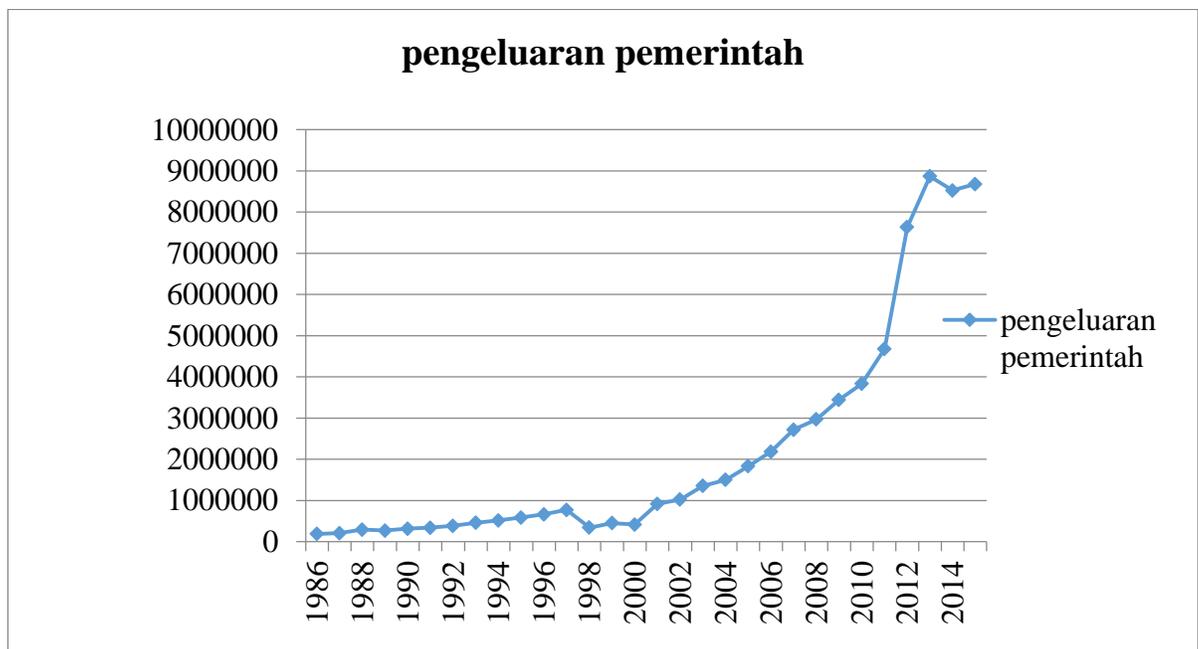
Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi yang sangat luas dan potensial yang dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar dari wilayah ini merupakan areal pertanian oleh penurunan sebesar Rp216,46 Milyar, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 5,10 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tabel dibawah ini.

Tabel I.1
Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1986-2015.

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)
1986	186.463	26.665.409
1987	205.200	30.336.268
1988	290.355	33.761.169
1989	267.150	36.369.447
1990	313.900	38.582.281
1991	336.900	40.370.436
1992	383.200	44.791.379
1993	458.700	51.291.832
1994	515.600	57.430.761
1995	584.000	59.679.064
1996	660.800	62.807.524
1997	771.000	70.007.744
1998	342.600	64.411.614
1999	449.000	64.330.882
2000	416.800	69.154.112
2001	916.200	71.908.359
2002	1.021.300	75.189.140
2003	1.352.000	78.805.608
2004	1.501.500	83.328.948
2005	1.830.600	87.897.800

2006	2.184.600	93.347.400
2007	2.717.900	99.792.300
2008	2.967.300	106.172.600
2009	3.444.400	111.559.200
2010	3.833.100	118.640.000
2011	4.677.800	126.487.200
2012	7.633.500	134.463.900
2013	8.866.900	142.617.700
2014	8.525.300	149.989.100
2015	8.679.300	157.632.900

Gambar I.1
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah
di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1986-2015.



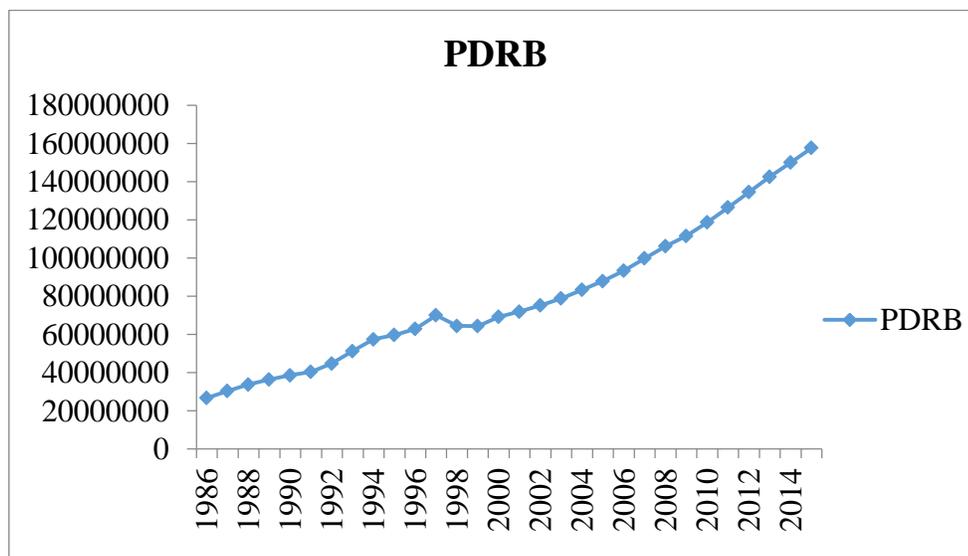
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar I.1 di atas, terlihat bahwa pengeluaran pemerintah di provinsi Sumatera Utara pada tahun 1986 ke tahun 1988 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen menjadi 290.355 juta, pada tahun 1989 mengalami penurunan sebesar 0,02 persen menjadi 267.150 juta,

pada tahun 1990 ke tahun 1997 mengalami peningkatan sebesar 0,4 persen menjadi 771.000 juta, pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 0,4 persen menjadi 342.600 juta, pada tahun 1999 meningkat sebesar 0,1 persen menjadi 449.000 juta, pada tahun 2000 turun sebesar 0,03 persen menjadi 416.800 juta, pada tahun 2001 ke tahun 2013 mengalami mengalami peningkatan sebesar 7,9 persen menjadi 8.866.900 juta, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,3 persen menjadi 8.525.300 juta, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen menjadi 8.679.300 juta.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar I.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1986-2015.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar I.2 di atas, terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara pada tahun 1986 ke tahun 1997 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebesar 43,34 persen menjadi 70.007.744 juta, pada tahun 1998 ke tahun 1999 mengalami penurunan sebesar 0,1 persen menjadi 64.330.882 juta, dan pada tahun 2000 ke tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 88,5 persen menjadi 157.632.900 juta.

Dimana hasil survei dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dapat juga mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang di atas tentang pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tentang hasil survei mengalami peningkatan tidak sejalan dengan data yang diteliti, maka dari itu peneliti mengambil judul **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 1986-2015”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi.

2. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.
3. Pada tahun 1999 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan tetapi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan.
4. Pada tahun 1989, tahun 2000 dan tahun 2014 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan tetapi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan.

C. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini lebih difokuskan pada dua variabel, dimana satu variabel bebas (*independent variabel*) dan satu variabel terikat (*dependent variabel*). Variabel bebas, pengeluaran pemerintah dan variabel terikat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

D. Definisi Operasional Variabel

Tabel I.2
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Pengeluaran pemerintah (X1)	Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. ⁵	1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri 4. Listrik, Gas & Air Minum 5. Bangunan 6. Perdagangan	Rasio

⁵Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 157.

		7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan 9. Jasa-jasa	
PDRB (Y1)	Produk Domestik Bruto (PDB), atau ditingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. ⁶	1. APBN 2. APBD	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu: Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015.

⁶*Ibid*, hlm. 22.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan dan memberikan pelatihan kemampuan peneliti yang diharapkan dapat memberikan informasi atas data-data yang digunakan dengan menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa studi, dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
2. Bagi Institusi Perguruan Tinggi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah perbendaharaan bacaan bagi Mahasiswa/I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca, sekaligus sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan yang diamati. Maka pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terdiri dari satu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di

Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2015”. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Di dalam bab ini peneliti menguraikan beberapa hal yakni latar belakang masalah yang berisi tentang apa saja masalah sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian ini, dimana hasil survei dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dapat juga mengalami penurunan, dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dengan mengangkat judul tentang ”Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2015 ”. Identifikasi masalah berisikan uraian penelusuran dan penjabaran seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian, Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara. Selanjtnya peneliti membatasi ruang lingkup dengan membatasi masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini lebih difokuskan pada dua variabel, dimana satu variabel bebas (*independent variabel*) dan satu variabel terikat (*dependent variabel*). Variabel bebas,

pengeluaran pemerintah dan variabel terikat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015. Tujuan penelitian adalah jawaban rumusan masalah dimana tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015. Kegunaan penelitian dalam penelitian ini terbagi 3 yaitu bagi peneliti, Bagi Institusi Perguruan Tinggi, dan Bagi peneliti selanjutnya.

BAB II merupakan landasan teori yang pada penelitian kuantitatif merupakan bagian upaya peneliti untuk meninjau dan membahas masalah yang menjadi objek penelitian berdasarkan dengan teori. Landasan teori dalam penelitian ini berisi uraian secara ringkas teori-teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti, dimana landasan teori terdiri dari kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III merupakan metodologi penelitian yang berisi penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian yaitu di Provinsi Sumatera Utara, dan waktu penelitian dilakukan dari bulan September 2017 sampai selesai. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2015, dan jumlah sampel yang terdapat

dalam penelitian ini sebesar 30 sampel. Teknik pengumpulan data adalah data sekunder, teknik pengumpulan data antara lain teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan, dan analisis data yang berisi analisis data panel, uji normalitas, analisis regresi sederhana, Uji koefisien determinasi (uji *r square*), dan uji signifikan parsial (uji *t*).

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan gambaran umum Provinsi Sumatera Utara yang mencakup sejarah singkat Provinsi Sumatera Utara, visi dan misi Provinsi Sumatera Utara. Pada bab ini juga menyajikan, deskripsi data penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran. Hasil kesimpulan ditarik dari perumusan masalah setelah proses analisis data dan pembahasan. Kesimpulan tersebut merupakan hasil akhir dari penelitian ini. Setelah itu, kemudian diberikan saran atas dasar kesimpulan yang diambil. Saran tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi objek penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa, tanah, dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.¹

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara satu dengan negara lain. Penting bagi kita untuk dapat memiliki definisi yang sama dalam mengartikan pembangunan. Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus-menerus pada *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan

¹Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional* (jakarta: PT Bumi Aksara, 2005). hlm 18-19.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota.²

Di negara-negara berkembang, yang sering juga dinamakan sebagai “Dunia Ketiga” konsep Produk Domestik Bruto (PDB) adalah konsep yang paling penting kalau dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu.³

Di dalam sesuatu perekonomian, di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang, barang dan jasa diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain. Selalu didapati produksi nasional diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri. Perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara dan membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Perusahaan multinasional tersebut menyediakan modal, teknologi dan tenaga ahli kepada negara di mana perusahaan itu beroperasi. Operasinya membantu menambah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan dan sering juga membantu menambah ekspor. Operasi mereka merupakan bagian yang

²Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 136.

³*Ibid.*, hlm. 138.

cukup penting dalam kegiatan ekonomi sesuatu negara dan nilai produksi yang disumbangkannya perlu dihitung dalam pendapatan nasional. Dengan demikian, Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam istilah inggrisnya *Gross Domestic Product* (GDP), adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara-negara tersebut dan negara asing.⁴

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (Regional) tertentu dalam waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional tanpa memilih atas faktor produksi.

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai iman, taqwa dan konsistensi serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa”.⁵ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Huud: 61.

⁴Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 34-35.

⁵Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul, 2004), hlm.140.

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."⁶

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kata *ista'mara* diambil dari kata *'amara* yang berarti memakmurkan. Huruf *sin* dan *ta* yang menyertai kata *ista'mara* ada yang memahaminya dalam arti perintah sehingga kata tersebut berarti Allah memerintahkan kamu memakmurkan bumi dan ada juga yang memahaminya sebagai penguat yakni menjadikan kamu benar-benar mampu memakmurkan dan membangun bumi. Ibnu Katsir memahaminya dalam arti menjadikan kamu pemakmur-pemakmur dan pengelola.⁷

Selain itu lafadz *'imarah* dalam ayat tersebut bermakna pertumbuhan ataupun kebangkitan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. *'Imarah* dimaksudkan tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan materi, tetapi juga spritualisme yaitu beribadah kepada Allah SWT.⁸

⁶Departemen Agama Republik Indonesia Al-qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Al-Fatih, 2012), hlm. 213.

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 6* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 278.

⁸Said Sa'ad Marthon, *Op.Cit.*, hlm. 141.

Jadi secara regional pertumbuhan ekonomi dapat decerminkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, yang artinya ketika sebuah sektor memiliki kontribusi yang besar namun pertumbuhannya lambat maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan sebaliknya ketika sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi maka sektor tersebut akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

b. Indikator Menghitung Pertumbuhan Ekonomi

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai dari akhir keseluruhan barang/jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut.

Penghitungan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dilakukan atas dua macam dasar harga yaitu:⁹

- a) Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, merupakan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku berfungsi untuk melihat

⁹Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 89.

dinamika/perkembangan struktur ekonomi yang riil pada tahun tersebut.

- b) Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan, merupakan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan berfungsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Contohnya jika kita ingin mengetahui berapa persen kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun 1998, 1999 dan tahun 2000, karena nilai/harga suatu produk tiap tahun berubah-ubah maka kita harus mengubah nilai Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 1998 dan 1999 dengan dasar harga tahun 2000 sehingga akan terlihat dengan jelas besaran kenaikan dari tiap tahunnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data-data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu sehingga kebijakan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-

hasilnya. Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup kabupaten dan kota adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha (*Industrial Original*).¹⁰

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh melalui tiga pendekatan:¹¹

1) Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit produksi dalam penyajiannya dikelompokkan dalam 9 sektor atau lapangan usaha yaitu:

- a) Pertanian.
- b) Pertambangan dan Penggalian.
- c) Industri Pengolahan.
- d) Listrik, Gas dan Air Bersih.
- e) Bangunan.

¹⁰Pratmaha Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (MIKROEKONOMI & MAKROEKONOMI)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 239-240.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 91.

- f) Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
- g) Pengangkutan dan Komunikasi.
- h) Jasa Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan.
- i) Jasa-jasa.

2) Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan semua komponen permintaan terakhir, yaitu:¹²

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b) Konsumsi pemerintah.
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stok.
- e) Ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor.

3) Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang

¹²*Ibid.*, hlm. 92.

dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Dalam pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini menurut sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Produk domestik bruto merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Dari 3 pendekatan tersebut secara konsep jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Selanjutnya produk domestik regional bruto yang telah diuraikan di atas disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

2. Pengeluaran Pemerintah

a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mangkoesoebroto, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.¹³

Pengeluaran atau belanja Negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, ditujukan untuk manajemen pemenuhan kebutuhan publik. Seperti disinggung di muka, pemerintah adalah pihak yang mewakili dan menjalankan tugas dan fungsi Negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relative serius.

Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Dibidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan

¹³Guritno, Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik*. Edisi 3 (Yogyakarta: BPFEE , 2008), hlm. 169.

¹⁴Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik* (Padang: Akademia Permata, 2013), hlm. 216.

meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan maupun untuk menambah investasi pemerintah.¹⁵

Pemerintah mutlak diperlukan di dalam setiap bentuk atau sistem perekonomian yaitu tidak hanya untuk menyediakan barang-barang publik, melainkan juga untuk mengalokasikan barang-barang produksi maupun barang konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Khusus bagi negara sedang berkembang kegiatan pemerintah pada umumnya selalu meningkat, karena pemerintah bertindak sebagai pelopor dan pengendalian pembangunan.

Pembelian pemerintah ke atas barang dan jasa dapat digolongkan kepada dua golongan yang utamanya: konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Yang termasuk dalam golongan yang pertama (konsumsi pemerintah) adalah pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat tulis dan kertas untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah.

¹⁵Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 244.

Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi. Memberikan beasiswa, bantuan untuk korban banjir, dan subsidi-subsidi pemerintah tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah ke atas produk nasional karena itu bukanlah untuk membeli barang dan jasa.¹⁶

Pemerintah bukan saja berfungsi untuk mengatur kegiatan perekonomian tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian. Di satu pihak kegiatan pemerintah melalui pemungutan pajak akan mengurangi pembelanjaan agregat. Akan tetapi pajak tersebut akan dibelanjakan lagi oleh pemerintah dan langkah tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat. Kerap kali pemerintah membelanjakan dana yang melebihi penerimaan pajak. Langkah seperti ini akan meningkatkan keseluruhan pembelanjaan agregat.¹⁷

Kalau kita melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, tampak bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di dalam semua macam sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini dapat kita lihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu.

¹⁶*Ibid*, hlm. 38.

¹⁷Sadono Sukirno, *Op.Cit.*, hlm. 87.

Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.¹⁸

Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangat penting. Sejumlah pengeluaran dibutuhkan untuk menciptakan infrastruktur yang mendorong aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disediakan pemerintah, tidak mungkin dapat memiliki populasi yang tinggi. Pemerintah juga menjalankan fungsi pada sisi permintaan pasar. Dengan permintaannya, pemerintah dapat mendorong produksi. Jika pemerintah menghentikan pengeluarannya, krisis pasti akan terjadi.¹⁹

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + X - M$ merupakan “sumber legitimasi” pandangan kaum *Keynesian* akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi yang sangat sederhana tersebut dengan gamblang dapat ditelaah bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut.

¹⁸Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 21-22.

¹⁹Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 59.

Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya.²⁰

Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan dan ini didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan rutin maupun penerimaan pembangunan. Demikian pula kegiatan pemerintah dibedakan menjadi kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan.²¹

b. Dasar Teori Pengeluaran Pemerintah

Identitas keseimbangan pendapatan pemerintah dari segi pendekatan pengeluaran pemerintah $Y = C + I + G + (X-M)$. beberapa teori dari para ahli mengenai pengeluaran pemerintah yaitu:²²

1. Teori Keynes

Menurut Keynes, pemerintah mempunyai peran untuk mengatur/mengendalikan kegiatan perekonomian lewat kebijaksanaan-

²⁰Dumairy, *Op.Cit.*, hlm. 161.

²¹*Ibid.*, hlm. 77.

²²*Ibid.*, hlm. 161-164

kebijaksanaan yang dikeluarkan agar tercipta suasana yang sehat dan tidak monopolis.²³

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah $Y = C+I+G$. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi dan (G) adalah pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian.

Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam menekankan pengeluaran pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka pemerintah

²³Masyhuri Machfudz dan Sujoni Nurhadi, *Teori Ekonomi Makro* (Malang: Uin-Maliki, 2012). hlm 13.

mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (*multiplier effect*) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (*over-heating*). Sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (*injection*) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

2. Teori Rostow dan Musgrave

Teori ini dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang didasarkan pada pandangan mereka melalui pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa Negara. Model ini menghubungkan tahap-tahap pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini

pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya.²⁴

Di tahap menengah peranan investasi pemerintah masih dibutuhkan namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta yang semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar juga semakin besar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke aktivitas-aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

3. Teori Wagner

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurut Wagner dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.²⁵

Pengamatan empiris terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat.

²⁴Sirojuzilam, *Regional Pembangunan, Perencanaan, Ekonomi* (Medan: USU Perss, 2011), hlm. 8-9.

²⁵Basuki Pujoalwanto, *Op.Cit.*, hlm. 176.

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab dimaksud adalah:

- a) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan.
- b) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.
- c) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi.
- d) Perkembangan demokrasi.
- e) Ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

4. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara (*voting*).²⁶ Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut mereka perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan

²⁶Dumairy, *Op.Cit.*, hlm. 163-164.

pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan yang menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga harus meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang.²⁷

c. Kebijakan Pemerintah

Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanaman modal apakah itu penanaman modal asing, maupun modal dalam negeri.²⁸

²⁷Guritno, Mangkoesobroto, *Op. Cit.*, hlm. 172.

²⁸Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 61.

d. Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting di antaranya adalah:²⁹

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan yang akan dilakukan.

2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Ada beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang.

3. Pertimbangan politik dan keamanan

Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara golongan masyarakat dan daerah menyebabkan kenaikan perbelanjaan

²⁹Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 168-169.

pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan.

e. **Macam-Macam Pengeluaran Pemerintah**

Berdasarkan macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 2, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat.³⁰

1. Menurut Organisasi

Pengeluaran pemerintah menurut organisasi digolongkan menjadi 3 yaitu:³¹

a) Pemerintah pusat

Dalam jenis pengeluaran ini pemerintah pusat memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi dua yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll, juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan

³⁰Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 144-145.

³¹*Ibid.*, hlm. 172-173

pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri dan lain-lain.

b) Pemerintah Provinsi

Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga.

c) Pemerintah Kabupaten/Kota

APBD dalam Kabupaten/Kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari, pembayaran pokok Pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman

kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya.

2. Menurut Sifatnya

Pengeluaran pemerintah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 5, antara lain:³²

a) Pengeluaran Investasi

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dan lain-lain. Dalam hal keuangan ini pemerintah tidak hanya mendanainya melalui APBN.

b) Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

c) Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan

³²*Ibid.*, hlm. 175

tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan lain-lain.

d) **Pengeluaran Penghematan Masa Depan**

Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dan lain-lain.

e) **Pengeluaran yang Tidak Produktif**

Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperluakn oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang.

f. Fungsi Pengeluaran Pemerintah

Dari uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional tidak memegang peranan yang penting dalam menentukan pembelanjaan pemerintah. Dengan perkataan lain, pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam masa kemunduran ekonomi,

misalnya, pendapatan pajak berkurang. Tetapi untuk mengatasi pengangguran itu pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan, maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya, pada waktu inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam pembelanjanya. Harus dijaga agar pengeluaran pemerintah tidak memperburuk keadaan inflasi yang berlaku.³³

Pada umumnya pengeluaran untuk barang dan jasa merupakan pengeluaran pemerintah yang terbesar. Biaya pegawai, keamanan, infrastruktur (jalan raya dan sebagainya), sekolah, fasilitas umum, dan lain-lain. Transfer melingkupi pelayanan kesehatan, tunjangan, dan lain-lain.³⁴

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, pemerintah memiliki empat peran yaitu:³⁵

- a. Peran alokasi (*allocation function*), yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.

³³*Ibid.*, hlm. 168-169.

³⁴Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63.

³⁵Dumairy, *Op.Cit.*, hlm. 158-161.

- b. Fungsi distribusi (*distribution function*), yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- c. Fungsi stabilisasi (*stabilization function*), yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkan jika berada dalam keadaan *equilibrium*.
- d. Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

g. Pengeluaran Pemerintah dalam Islam

Keberhasilan negara untuk melakukan kebijakan pengeluaran yang disyaratkan syariah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara (*Government Expenditure*) dalam islam bersumber atas nama zakat, infak, shadaqah, jizyah yang terkumpul dalam Baitul Maal. Kebutuhan publik dalam ekonomi islam adalah kebutuhan dlaruriyah (urgen) bagi kemaslahatan bersama dalam kehidupan manusia.

Kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam Islam memiliki prinsip untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan sosial dan ekonomi harus sesuai dengan kerangka

umum hukum Islam seperti yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³⁶

Islam memecahkan problematika ekonomi dalam mendistribusikan harta dan jasa di tengah masyarakat, untuk menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah SWT mengingatkan betapa pentingnya dalam mendistribusikan harta dalam firman Allah Q.S. Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka

³⁶Nurul Izzah, *Analisis Vector Autoregression (VAR) Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi DI Sumatera Utara Tahun 1993-2013*, Jurnal (Padangsidimpunan:IAIN Padangsidimpunan,2015), hlm.134.

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.³⁷

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa harta rampasan yang diperoleh dari Bani an-Nadhir diserahkan Allah sepenuhnya kepada Rasul SAW., maka ayat di atas menjelaskan harta rampasan yang akan diperoleh pada masa-masa yang akan datang. Disini seakan-akan ada yang berkata: Kami telah mengetahui bahwa harta rampasan (*fai*) yang diperoleh dari Bani an-Nadhir adalah buat Rasul SAW.

Allah berfirman: *Apa saja* dari fa'I yakni harta rampasan yang dikembalikan yakni diserahkan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk negeri-negeri di mana dan kapan pun maka semuanya adalah milik Allah. Dia yang berwenang membaginya. Dia telah menetapkan bahwa harta rampasan itu menjadi milik Rasul, atau pemimpin tertinggi umat setelah wafatnya Rasul saw, para kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibn as-Sabil yakni orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, supaya ia yakni harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Karena itu laksanakanlah ketetapan Allah ini dan apa saja yang diberikan Rasul serta hukum-hukum yang ditetapkannya bagi kamu maka terimalah ia dengan senang hati dan laksanakanlah dengan tulus dan apa yang dia larang kamu menyangkut apapun maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah yakni hindari segala hal yang dapat mengundang siksa dan pembalasan-Nya karena sesungguhnya Allah sangat keras pembalasan-Nya.³⁸

Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Sebagai suatu panduan pokok bagi pengeluaran publik, teori pengeluaran islam memakai kaidah-kaidah yang diambil dari *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* guna menghindari potensi-potensi inefisiensi pengeluaran, dan juga norma-norma konsumsi Islam, dan dijadikan kaidah rasionalitas bagi pengeluaran Negara. Enam kaidah tersebut adalah:

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia Al-qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Al-Fatih, 2012), hlm. 213.

³⁸M. Quraish Shihab, Volume 15, *Op.Cit.*, hlm. 111-112.

- a. Kriteria pokok bagi semua alokasi pengeluaran harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat.
- b. Penghapusan kesulitan dan kerugian harus didahulukan daripada penyediaan keamanan.
- c. Kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kemaslahatan minoritas yang lebih sedikit.
- d. Suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik.
- e. Siapapun yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya.
- f. Sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sebagai berikut:³⁹

- a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
- b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
- c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
- e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi intervensi pasar.

³⁹Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam (Jakarta: Kencana, 2012)*, hlm. 189.

Pemerintah juga mengeluarkan uang untuk subsidi-subsidi, pensiun, bantuan sosial, dan sebagainya. Ini termasuk “Transfers” yang dikurangkan dari penerimaan pajak. Transfer ini bukanlah pembelian hasil produksi tahun yang berjalan dan bukan pula balas karya faktor produksi, oleh karena itu tidak ikut diperhitungkan dalam pembelanjaan nasional (biarpun dicantumkan dalam APBN).

Pengeluaran pemerintah menunjukkan kecenderungan naik terus, mengikuti perkembangan produksi nasional dan penambahan penduduk. Kini sudah mencapai lebih dari 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pengeluaran pemerintah terutama dibiayai dari penerimaan pajak. Tetapi untuk proyek-proyek pembangunan masih dilengkapi dengan kredit atau bantuan luar negeri.⁴⁰

Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua kelompok besar.

1.1 Belanja pemerintah pusat, yaitu dirinci meliputi:

a. Pengeluaran rutin:

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangkapyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintah.⁴¹

- 1) Belanja pegawai (gaji, pensiun, uang makan, uang jalan, dll),
- 2) Belanja barang (kertas, mobil, pemeliharaan gedung, dll),

⁴⁰T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 180.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 377.

- 3) Pembayaran bunga hutang (dalam negeri dan luar negeri),
 - 4) Subsidi-subsidi,
 - 5) Pengeluaran rutin lainnya.
- b. Pengeluaran pembangunan yaitu yang tujuannya untuk memajukan kegiatan ekonomi di bidang industri, pertanian, perhubungan, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dan lain-lain. Pengeluaran pembangunan sebagian besar digolongkan sebagai investasi dan dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan.

1.2 Dana perimbangan, yaitu subsidi kepada daerah, melalui yang disebut dana bagi hasil dan dana alokasi umum/khusus.⁴²

Pemerintah membelanjakan hampir 200 milyar dollar pada tahun 1980 untuk menyediakan dan jasa. Dalam pembelian ini badan pemerintah bertindak seperti halnya perusahaan, menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Sebagian besar *output* ini berupa barang konsumsi kolektif, barang dengan eksternalitas yang besar, atau jasa yang manfaatnya tidak dapat dipasarkan. Dalam berbuat demikian tentu mengubah alokasi sumber daya.⁴³

⁴²Gilarso, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁴³Lipsey dan Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, edisi keenam (PT. Bina Aksara:Jakarta 1985), hlm. 536-537.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Harry A.P.Sitaniapessy (2013)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD (Jurnal Economia, Politeknik Negeri Ambon, Vol.9).	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Sektor Perindustrian dan Perdagangan baik secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB. Selain itu PDRB berpengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, Nyoman Yuliarmi (2014)	Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di provinsi bali (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana).	Pengeluaran pemerintah dan investasi dari tahun 2000- 2012 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Disamping itu pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan

		<p>melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengaruh yang signifikan dari pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung, menunjukkan bahwa perlu dilakukan kajian terhadap penetapan pendistribusian belanja dan alokasi investasi yang merata sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan.</p>
Umdatul Husna (2015)	<p>Pengaruh Pdrb, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kota Se Jawa Tengah (Jurnal, Universitas Diponegoro Semarang).</p>	<p>Hasil penelitian yang diperoleh dengan program Eviews 7 bahwa nilai sebesar 0,669109 menunjukkan variabel PAD dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah sebesar 66,9 persen. Aktivitas perekonomian di Daerah Kota Se Jawa Tengah berkembang dengan baik, sehingga PAD dapat meningkat melalui penarikan pajak.</p>

Sebelumnya telah banyak penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Keseluruhan

hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam mengkaji penelitian ini.

Harry A.P.Sitaniapessy meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tengah periode 2005-2011, melalui regresi sederhana dan regresi berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Harry A.P.Sitaniapessy yaitu sama-sama meneliti Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tengah periode 2005-2011. Metode yang digunakan juga memiliki persamaan dengan penelitian Harry A.P.Sitaniapessy yaitu sama-sama menggunakan regresi sederhana.

Perbedaannya terletak pada wilayah, waktu dan analisisnya. Penelitian Harry A.P.Sitaniapessy ini meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tengah periode 2005-2011, sementara penelitian ini meneliti Tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara Tahun 1998-2014.

Sama halnya dengan penelitian I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, Nyoman Yuliarmi tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, Nyoman Yuliarmi yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah.

Perbedaannya terletak pada wilayah, waktu, analisi dan variabel terikatnya. Penelitian I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, Nyoman Yuliarmi ini meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sementara penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara Tahun 1998-2014, dan metode yang digunakan penelitian ini adalah metode regresi sedernaha.

Begitu juga dengan penelitian Umdatul Husna meneliti tentang Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Daerah Kota Se Jawa Tengah dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan metode analisis *ordinary least squares/OLS*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Umdatul Husna yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah.

Perbedaannya terletak pada wilayah, waktu, dan analisisnya. Penelitian Umdatul Husna meneliti tentang Pengaruh Pdrb, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Daerah Kota Se Jawa Tengah, sementara penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara

Tahun 1998-2014. Berikut penelitian terdahulu yang disajikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dapat disebut juga dengan istilah paradigma penelitian yang menggambarkan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam satu penelitian.

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.⁴⁴

Pengeluaran Pemerintah mempunyai hubungan yang kuat dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi karena belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi *agent of development*. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena adanya kenaikan output secara agregat.

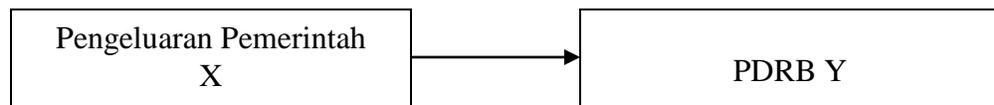
Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data-data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu sehingga kebijakan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya.

⁴⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

Adanya hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.1
Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif (logika deduktif). Logika deduktif adalah menganut koherensi, mengingat premis merupakan informasi yang bersumber dari pernyataan yang telah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang akan dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dari premis.⁴⁵

Ho = Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara.

Ha = Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara.

⁴⁵Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015, Penelitian dilakukan mulai bulan September 2017 sampai April 2018.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dihasilnya.¹

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel.²

Penelitian ini menggunakan data berdasarkan time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan tentang perkembangan suatu kegiatan selama periode spesifik yang diamati.

¹Suharsimi Arikunto, *Prasedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 12.

²Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 39.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama.³ Populasi dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2015.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (contoh), untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (*representative*) terhadap populasinya.⁴ Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan *sampling* yang diambil dari populasi itu. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan.

Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah data pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara dengan rentang waktu tahun 1986-2015. Jumlah sampel yang terdapat dalam penelitian ini sebesar 30 sampel. Teknik penggunaan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *purposive*

³Andi Supangat , *Statistika* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 3.

⁴*Ibid.*, hlm. 10.

sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁵ Jenis data yang digunakan data *time series* data antar tempat atau ruang di provinsi Sumatera Utara.

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah peneliti. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih–milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.⁶ Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Badan Pusat Statistik (BPS).

⁵Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 138.

⁶Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 152-153.

b. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber buku-buku, jurnal dan skripsi terkait dengan variabel penelitian yang dicantumkan dalam landasan teori.

E. Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau terambil dari populasi yang normal. Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data kontinu berdistribusi normal sehingga analisis dengan, uji t, R-Square (R^2) dapat dilaksanakan.

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencermati dengan metode OLS secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera* (JB). Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diambil adalah data yang terdistribusi normal.

Penerapan metode kuadrat terkecil untuk model regresi linier tidak membuat asumsi apapun mengenai distribusi probabilitas dari *error e*. Asumsi yang dibuat hanyalah bahwa gangguan tadi mempunyai nilai yang diharapkan (rata-rata) nol, tak berkorelasi dan mempunyai variansi konstan. Dengan asumsi ini, penaksir kuadrat terkecil a dan σ^2 memenuhi beberapa sifat statistik

yang diinginkan, seperti ketakbiasaan dan variansi yang minimum. Jika tujuan yang diharapkan hanya untuk melakukan penaksiran titik (point estimation), maka metode kuadrat terkecil sudah mencukupi. Tetapi, penaksiran titik hanyalah satu aspek inferensi statistik.⁷

b. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan matematis antara variabel respons dan variabel penjelas.⁸ Analisis regresi sederhana merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaan.⁹ Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen pengeluaran pemerintah (X) terhadap variabel dependen PDRB (Y).

Adapun bentuk persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:¹⁰

$$Y = a + Bx$$

Dimana:

Y = Variabel PDRB

X = Variabel pengeluaran pemerintah

⁷Abdul Aziz, *Ekonometrika* (Malang: Anggota IKAPI, 2010), hlm. 32.

⁸Setiawan dan Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 61.

⁹Agus Irianto, *Konsep Dasar Statistik, Aplikasi dan Pembangunan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

¹⁰Soegyarto Mangkuatmodje, *Statistik Lanjutan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 258.

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Regresi sederhana adalah regresi dengan menggunakan satu variabel bebas yang ditujukan untuk mempermudah pemahaman konsep regresi, karena model inilah yang paling sederhana dibanding dengan model-model lainnya. Tanpa mempelajari model linier sederhana memungkinkan terlalu sukar mendalami dan memahami model-model lainnya. Untuk mempermudah pemahaman regresi data dari dua buah variabel yaitu pada pola penyebaran skor (titik-titik penyebaran skor) yaitu titik-titik perpotongan antara nilai X dan Y.

Analisis regresi dilakukan apabila jenis variabelnya (variabel bebas dan variabel terikat) terdefiniskan dengan jelas. Penentuan mana variabel bebas dan terikat dapat dilakukan secara empiris, atau hasil analisis yang cermat, atau hasil diskusi dengan pakar. Pada umumnya variabel yang mudah didapat (diukur) dianggap sebagai variabel bebas.

c. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel tidak bebas dengan asumsi variabel yang lain

konstan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas menggunakan Eviews9.

Ho = Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.

Ha = Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.

d. Uji Koefisien Determinasi (Uji *R Square*)

R square (R^2) atau kuadrat dari *r*, yaitu menunjukkan nilai koefisien determinasinya. Angka ini akan diubah ke dalam bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikan 0,05.

Besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (semakin kecil kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen) besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dilihat dari besarnya determinasi parsial (R^2).¹¹

¹¹Algifari, *Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi*, Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 58.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara

Di zaman pemerintahan Belanda, Sumatera merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement Van Sumatera*, yang meliputi seluruh Sumatera, dikepalai oleh seorang *Gouverneur* berkedudukan di Medan. Sumatera terdiri dari daerah-daerah administratif yang dinamakan keresidenan.

Pada awalnya kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintah yaitu Provinsi Sumatera yang dikepalai oleh seorang gubernur dan terdiri dari daerah-daerah administratif keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen.¹

Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu keresidenan Aceh, keresidenan Sumatera Timur, dan keresidenan Tapanuli.

¹Badan Pusat Statistik, *Sumatera-Utara-Dalam-Angka-2014* di akses 07 April 2016, 20:35 WIB.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 10 tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintah di Sumatera dengan keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan gubernur Sumatera Utara diadakan. Selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 24 tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk daerah otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi Provinsi Aceh.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada $1^0 - 4^0$ Lintang Utara dan $98^0 - 100^0$ Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara $72.981,23 \text{ Km}^2$. Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

- a. Pesisir Timur
- b. Pegunungan Bukit Barisan
- c. Pesisir Barat
- d. Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam Provinsi yang *Sumatra's Oostkust* paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah ini termasuk *Residentie Sumatra's Oostkust* bersama Provinsi Riau.

Di wilayah tengah Provinsi berjajar pegunungan bukit barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang mmenjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar danau toba dan pulau samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan bahasa Minangkabau. Untuk mengetahui 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel IV.1
Kabupaten/Kota dan Pusat Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan
1	Kabupaten Nias	Gunung Sitoli
2	Kabupaten Mandailing Natal	Panyabungan
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sipirok
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan
5	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung
6	Kabupaten Toba Samosir	Pangururan
7	Kabupaten Labuhan Batu	Rantau Prapat
8	Kabupaten Asahan	Kisaran
9	Kabupaten Simalungun	Raya
10	Kabupaten Dairi	Sidikalang
11	Kabupaten Karo	Kabanjahe
12	Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam
13	Kabupaten Nias Selatan	Teluk Dalam
14	Kabupaten Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul
15	Kabupaten Pakpak Bharat	Salak
16	Kabupaten Samosir	Balige
17	Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah
18	Kabupaten Batubara	Limapuluh
19	Kabupaten Padang Lawas Utara	Gunung Tua
20	Kabupaten Padang Lawas	Sibuhuan
21	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang
22	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan
23	Kabupaten Nias Utara	Lotu
24	Kabupaten Nias Barat	Lahomi
25	Kabupaten Langkat	Stabat
26	Kota Sibolga	-
27	Kota Tanjungbalai	-
28	Kota Pematangsiantar	-
29	Kota Tebing Tinggi	-
30	Kota Medan	-
31	Kota Binjai	-
32	Kota Padangsidempuan	-
33	Kota Gunungsitoli	-

Pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara terletak di Kota Medan.

Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatera sesaat

Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi eks keresidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh. Sumatera Utara dibagi kepada 25 Kabupaten, 8 Kota (dahulu kotamadya), 325 Kecamatan, dan 5.456 Kelurahan/Desa.

2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara

a. Visi

Menjadi Provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera.

b. Misi

- 1) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi.
- 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good govermance* dan *clea govermance*).²

B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data adalah menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah. Deskripsi data meliputi penyusunan data dalam bentuk tampilan yang mudah terbaca secara lengkap.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefenisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah atau regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun.

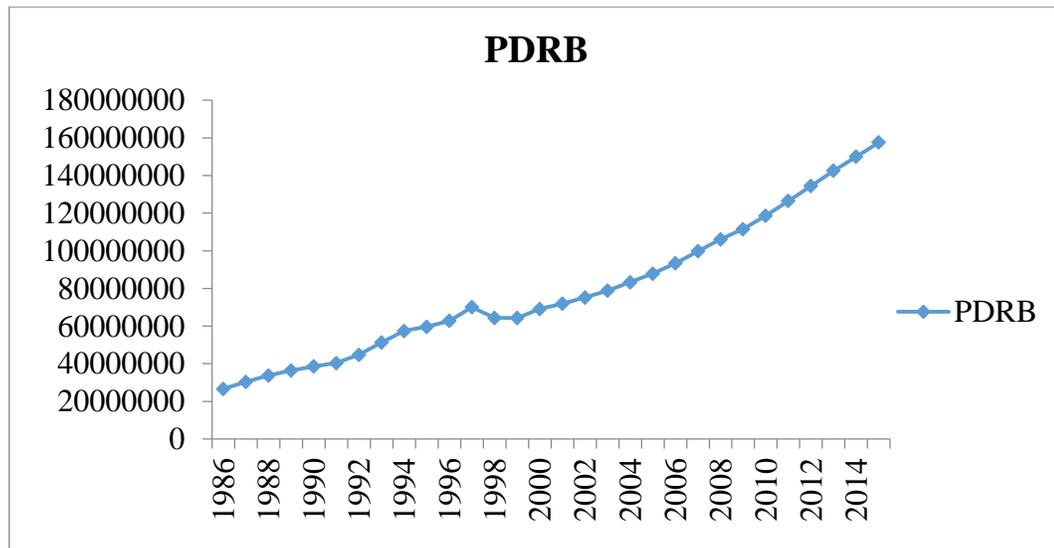
²Badan Pusat Statistik, *Sumatera-Utara-Dalam-Angka-2015* di akses 07 April 2016, 20:36 WIB.

Tabel IV.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1986-2015
(Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)
1986	26.665.409
1987	30.336.268
1988	33.761.169
1989	36.369.447
1990	38.582.281
1991	40.370.436
1992	44.791.379
1993	51.291.832
1994	57.430.761
1995	59.679.064
1996	62.807.524
1997	70.007.744
1998	64.411.614
1999	64.330.882
2000	69.154.112
2001	71.908.359
2002	75.189.140
2003	78.805.608
2004	83.328.948
2005	87.897.800
2006	93.347.400
2007	99.792.300
2008	106.172.600
2009	111.559.200
2010	118.640.000
2011	126.487.200
2012	134.463.900
2013	142.617.700
2014	149.989.100
2015	157.632.900

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar IV.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1986-2015.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel IV.2 dan Gambar IV.1 di atas, terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara pada tahun 1986 ke tahun 1987 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebesar 3,6 persen menjadi 30.336.268 juta, pada tahun 1987 ke tahun 1988 mengalami peningkatan sebesar 3,4 persen menjadi 33.761.169 juta, pada tahun 1988 ke tahun 1989 mengalami peningkatan sebesar 2,6 persen menjadi 36.369.447 juta, pada tahun 1989 ke tahun 1990 mengalami peningkatan sebesar 2,2 persen menjadi 38.582.281 juta, pada tahun 1990 ke tahun 1991 mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen menjadi 40.370.436 juta.

Pada tahun 1991 ke tahun 1992 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebesar 4,4 persen menjadi 44.791.379 juta, pada tahun 1992 ke tahun 1993 mengalami peningkatan sebesar 6,5 persen menjadi 51.291.832 juta, pada tahun 1993 ke tahun 1994 mengalami peningkatan sebesar 6,1 persen menjadi 57.430.761 juta, pada tahun 1994 ke tahun 1995 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebesar 2,2 persen menjadi 59.679.064 juta, pada tahun 1995 ke tahun 1996 mengalami peningkatan sebesar 3,1 persen menjadi 62.807.524 juta.

Pada tahun 1996 ke tahun 1997 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen menjadi 70.007.744 juta, sedangkan pada tahun 1997 ke tahun 1998 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan sebesar 5,5 persen menjadi 64.411.614 juta, pada tahun 1998 ke tahun 1999 mengalami penurunan sebesar 0,1 persen menjadi 64.330.882 juta, pada tahun 1999 ke tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 4,8 persen menjadi 69.154.112 juta, pada tahun 2000 ke tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 2,7 persen menjadi 71.908.359 juta.

Pada tahun 2001 ke tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 3,2 persen menjadi 75.189.140 juta, pada tahun 2002 ke tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 3,6 persen menjadi 78.805.608 juta, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami

peningkatan sebesar 4,5 persen menjadi 83.328.948 juta, pada tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 4,5 persen menjadi 87.897.800 juta, pada tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 5,4 persen menjadi 93.347.400 juta.

Pada tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 6,4 persen menjadi 99.792.300 juta, pada tahun 2007 ke tahun 2008 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebesar 6,3 persen menjadi 106.172.600 juta, pada tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 5,3 persen menjadi 111.559.200 juta, pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 7 persen menjadi 118.640.000 juta, pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 7,8 persen menjadi 126.487.200 juta.

Pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 7,9 persen menjadi 134.463.900 juta, pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 8,1 persen menjadi 142.617.700 juta, pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 7,3 persen menjadi 149.989.100 juta, dan pada tahun 2014 ke tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebesar 7,6 persen menjadi 157.632.900 juta.

2. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap

tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

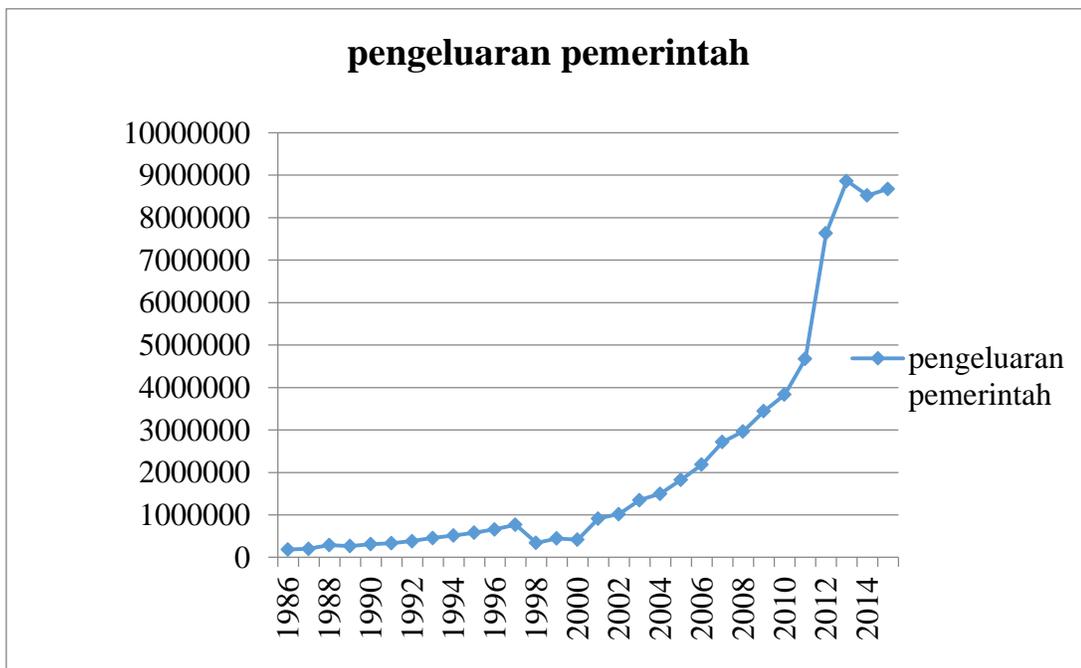
Tabel IV.3
Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1986-2015
(Juta Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)
1986	186.463
1987	205.200
1988	290.355
1989	267.150
1990	313.900
1991	336.900
1992	383.200
1993	458.700
1994	515.600
1995	584.000
1996	660.800
1997	771.000
1998	342.600
1999	449.000
2000	416.800
2001	916.200
2002	1.021.300
2003	1.352.000
2004	1.501.500
2005	1.830.600
2006	2.184.600
2007	2.717.900
2008	2.967.300
2009	3.444.400
2010	3.833.100

2011	4.677.800
2012	7.633.500
2013	8.866.900
2014	8.525.300
2015	8.679.300

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar IV.2
Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1986-2015.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel IV.3 dan Gambar IV.2 di atas, terlihat bahwa pengeluaran pemerintah di provinsi Sumatera Utara pada tahun 1986 ke tahun 1987 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen menjadi 205.200 juta, pada tahun 1987 ke tahun 1988 mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen menjadi 290.355 juta, pada tahun 1988 ke tahun 1989 mengalami penurunan sebesar 0,02 persen menjadi 267.150 juta, pada tahun 1989 ke tahun

1990 mengalami peningkatan sebesar 0,01 persen menjadi 313.900 juta, pada tahun 1990 ke tahun 1991 mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen menjadi 336.90 juta.

Pada tahun 1991 ke tahun 1992 mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen menjadi 383.200 juta, pada tahun 1992 ke tahun 1993 mengalami peningkatan sebesar 0,07 persen menjadi 458.700 juta, pada tahun 1993 ke tahun 1994 mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen menjadi 515.600 juta, pada tahun 1994 ke tahun 1995 mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen menjadi 584.000 juta, pada tahun 1995 ke tahun 1996 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 0,07 persen menjadi 660.800 juta.

Pada tahun 1996 ke tahun 1997 mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen menjadi 771.000 juta, pada tahun 1997 ke tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 0,4 persen menjadi 342.600 juta, pada tahun 1998 ke tahun 1999 mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen menjadi 449.000 juta, pada tahun 1999 ke tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 0,03 persen menjadi 416.800 juta, pada tahun 2000 ke tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 0,4 persen menjadi 916.200 juta.

Pada tahun 2001 ke tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen menjadi 1.021.300 juta, pada tahun 2002 ke tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen menjadi 1.352.000 juta, pada tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen menjadi 1.501.500 juta, pada tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen menjadi

1.830.600 juta, pada tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen menjadi 2.184.600 juta.

Pada tahun 2006 ke tahun 2007 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 0,5 persen menjadi 2.717.900 juta, pada tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 0,2 persen menjadi 2.967.300 juta, pada tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,4 persen menjadi 3.444.400 juta, pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen menjadi 3.833.100 juta, pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen menjadi 4.677.800 juta.

Pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2,9 persen menjadi 7.633.500 juta, pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,2 persen menjadi 8.866.900 juta, pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,3 persen menjadi 8.525.300 juta, dan pada tahun 2014 ke tahun 2015 pengeluaran pemerintah di provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen menjadi 8.679.300 juta.

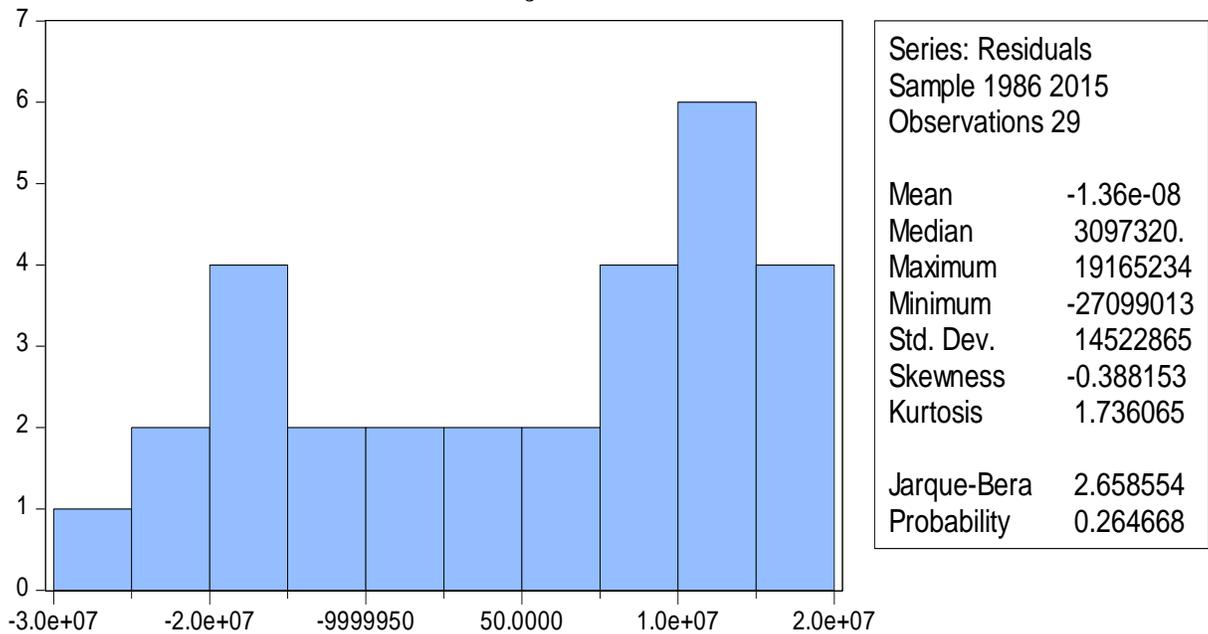
C. Hasil Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas residual metode OLS secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera* (JB). Metode JB ini didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat *asymptotic*. Untuk mengetahui residual berdistribusi normal atau tidak maka digunakan uji

normalitas dengan menggunakan uji *Jarque-Bera*. Hasil uji *Jarque-Bera* dapat dilihat pada Gambar IV.3 berikut ini.

Gambar IV.3
Uji Normalitas



Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Jarque-Bera $> \alpha$ (0,05), yaitu nilai Jarque-Bera sebesar $2.658554 > 0,05$ maka hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

2. Hasil Estimasi Regresi

Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Hasil estimasi yang diperoleh menggunakan model dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Uji Persamaan Regresi

Dependent Variable: PDRB
Method: Least Squares
Date: 06/28/18 Time: 22:08
Sample: 1986 2015
Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51427121	3530828.	14.56517	0.0000
PP	12.53493	0.997702	12.56381	0.0000
R-squared	0.853935	Mean dependent var		79307734
Adjusted R-squared	0.848525	S.D. dependent var		37999621
S.E. of regression	14789362	Akaike info criterion		35.92319
Sum squared resid	5.91E+15	Schwarz criterion		36.01748
Log likelihood	-518.8862	Hannan-Quinn criter.		35.95272
F-statistic	157.8493	Durbin-Watson stat		0.226142
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews9

Estimation Command:

=====

LS PDRB C PP

Estimation Equation:

=====

PDRB = C(1) + C(2)*PP

Substituted Coefficients:

=====

PDRB = 51427121.049 + 12.5349313161*PP

Dari hasil *output* diatas dapat ditulis persamaan regresi sederhana:

$$\text{PDRB} = 51427121.049 + 12.535 \text{ PP.}$$

Persamaan yang terbentuk di atas dapat menjelaskan bahwa nilai konstanta dalam penelitian ini adalah 51427121.049 yang artinya jika PDRB diasumsikan sebesar 1 maka pengeluaran pemerintah sebesar 12.535 juta.

3. Uji t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independent secara sendiri (parsial) terhadap variabel dependent. *Output* uji t pada Eviews dapat dilihat pada *t-Statistic* dan Prob. Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara. Untuk hasil pengujian uji t pada Tabel di bawah adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5
Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51427121	3530828.	14.56517	0.0000
PP	12.53493	0.997702	12.56381	0.0000

Sumber: Hasil olahan *Output Eviews 9*.

Untuk mengetahui kebenaran dari pernyataan yang dihipotesis, maka peneliti melihatnya berdasarkan hasil dari uji t. Dengan kategori sebagai berikut:

a. Merumuskan Hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2015.

H_a : Terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2015.

- b. Menentukan nilai t_{hitung} berdasarkan hasil pengujian regresi data *time series* diketahui bahwa nilai t_{hitung} Pengeluaran Pemerintah adalah 12.56381.
- c. Menentukan nilai t_{tabel} dengan ketentuan nilai $\alpha / 2 = 0,05 / 2 = 0,025$ dan derajat kebebasan (df) = $(n-k)$, $df = 30 - 2 = 28$. Sehingga nilai t_{tabel} adalah 2,0484.
- d. Kriteria Pengujian Hipotesis:
 1. Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima.
 2. Jika $-t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.
- e. Kesimpulan: Dari hasil pengujian data *time series* menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($12.56381 > 2,0484$) yang artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2015.

4. R-Square (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan uji untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. *Output* uji koefisien determinasi dapat dilihat pada R-squared dan Adjusted R-squared. Dalam penelitian ini digunakan R-squared (R^2).

Tabel IV.6
R-Square (R²)

R-squared	0.853935	Mean dependent var	79307734
Adjusted R-squared	0.848525	S.D. dependent var	37999621
S.E. of regression	14789362	Akaike info criterion	35.92319
Sum squared resid	5.91E+15	Schwarz criterion	36.01748
Log likelihood	-518.8862	Hannan-Quinn criter.	35.95272
F-statistic	157.8493	Durbin-Watson stat	0.226142
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olahan *Output Eviews 9*.

Dari hasil *output* di atas menunjukkan besarnya nilai R² sebesar 0.853935 yang diambil dari nilai *R-Squared*. Artinya bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 85.39% sedangkan sisanya sebesar 14.61% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Dalam arti lain bahwa masih ada variabel lain di luar model yang mempengaruhi PDRB.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera utara dapat dilihat pada hasil olahan dalam penelitian ini membentuk persamaan:

$$\text{PDRB} = 51427121.049 + 12.535 \text{ PP.}$$

Persamaan yang terbentuk di atas dapat menjelaskan bahwa nilai konstanta dalam penelitian ini adalah 51427121.049 yang artinya jika PDRB diasumsikan sebesar 1 maka pengeluaran pemerintah sebesar 12.535 juta.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya.

Menurut Suparmoko, pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi, pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang kuat dengan PDRB atau pertumbuhan ekonomi karena belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi *agent of development* dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian.

Tingkat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi yang diperoleh dari nilai *R-Squared* nya yaitu sebesar 0.853935 atau sama dengan 85.39% sedangkan sisanya sebesar 14.61% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model lain.

Dari hasil pengujian data *time series* menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($12.56381 > 2,0484$) atau dengan melihat tingkat signifikan

sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari α (0,05) dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Harry A.P.Sitaniapessy yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB. Dan begitu juga dengan penelitian M. Siddik Bancin yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

E. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar memperoleh hasil sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Keterbatasan bahan materi dari skripsi ini, seperti kurangnya buku-buku yang menjelaskan lebih detail tentang variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.
2. Keterbatasan dalam hal data yang diperoleh oleh peneliti. Yang mana peneliti hanya dapat memperoleh data selama tahun 1986-2015.
3. Keterbatasan dalam penggunaan variabel independen, yaitu hanya menggunakan satu variabel independen. Sedangkan masih ada variabel

independen lain yang mempengaruhi variabel dependen sebesar 15.02 persen sebagaimana yang ditunjukkan oleh *R-Square*.

Walaupun demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya bisa lebih dapat disempurnakan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji t , dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah 12.56381 nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yang diperoleh 2,0484, berdasarkan pengujian ini maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2015, ada beberapa saran yang ingin disimpulkan peneliti, yaitu:

1. Bagi pemerintah, peneliti menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan dengan melakukan kebijakan ekonomi terhadap penerimaan dan pengeluaran dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.
2. Bagi masyarakat, peneliti menyarankan agar masyarakat di provinsi Sumatera Utara untuk lebih meningkatkan kesadarannya akan membayar pajak, retribusi

daerah, kasil kekayaan daerah lainnya, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari variabel independen dalam kesempatan ini, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Ekonometrika*, Malang: Anggota IKAPI, 2010.
- Agus Irianto, *Konsep Dasar Statistik, Aplikasi dan Pembangunan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Algifari, *Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi*, Edisi 2, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Andi Supangat, *Statistika*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Badan Pusat Statistik, *Sumatera-Utara-Dalam-Angka-2014* di akses 07 April 2016, 20:35 WIB.
- Badan Pusat Statistik, *Sumatera-Utara-Dalam-Angka-2015* di akses 07 April 2016, 20:36 WIB.
- Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia Al-qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Al-Fatih, 2012.
- Dumairy, *Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 1983.
- , *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Guritno, Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik*. Edisi 3, Yogyakarta: BPFEE , 2008.
- Harry A. P. Sitaniapessy, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD”, dalam *Jurnal: Economia*.
- Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik*, Padang: Akademia Permata, 2013.
- Lipsey dan Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, edisi keenam, PT. Bina Aksara: Jakarta 1985.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 6*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Masyhuri Machfudz dan Sujoni Nurhadi, *Teori Ekonomi Makro*, Malang: Uin-Maliki, 2012.
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- , *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nurul Izzah, *Analisis Vector Autoregression (VAR) Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi DI Sumatera Utara Tahun 1993-2013*, *Jurnal*, Padangsidempuan:IAIN Padangsidempuan,2015.
- Pratmaha Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (MIKROEKONOMI & MAKROEKONOI)*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- , *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Setiawan dan Dwi Endah Kusri, *Ekonometrika*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sirojuzilam, *Regional Pembangunan, Perencanaan, Ekonomi*, Medan: USU Perss, 2011.
- Soegyarto Mangkuatmodje, *Statistik Lanjutan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.

- Suharsimi Arikunto, *Prasedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Umdatul Husna, “Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota Se Jawa Tengah,” Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2015.
- William A. McEachern, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Mahasiswa

Nama : ENTI SERIANI SIREGAR
Nim : 13 230 0010
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH
Tempat/Tanggal Lahir : Bargottopong Julu/ 08 Oktober 1995
Alamat : Bargottong Julu, Kec. Halongonan, Kab. Padang
Lawat Utara
Telepon/No.HP : 0823 6602 4608

2. Nama Orang Tua

Ayah : SUTAN GURU SIREGAR
Ibu : SITI ANGAN HARAHAHAP
Alamat : Bargottong Julu, Kec. Halongonan, Kab. Padang
Lawas Utara

3. Pendidikan

Tahun 2001-2007 : SD Negeri Bargottopong Jae
Tahun 2007-2010 : MTsS Nurul Huda Hiteurat
Tahun 2010-2013 : MAN Barumun Tengah
Tahun 2013-2018 : Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

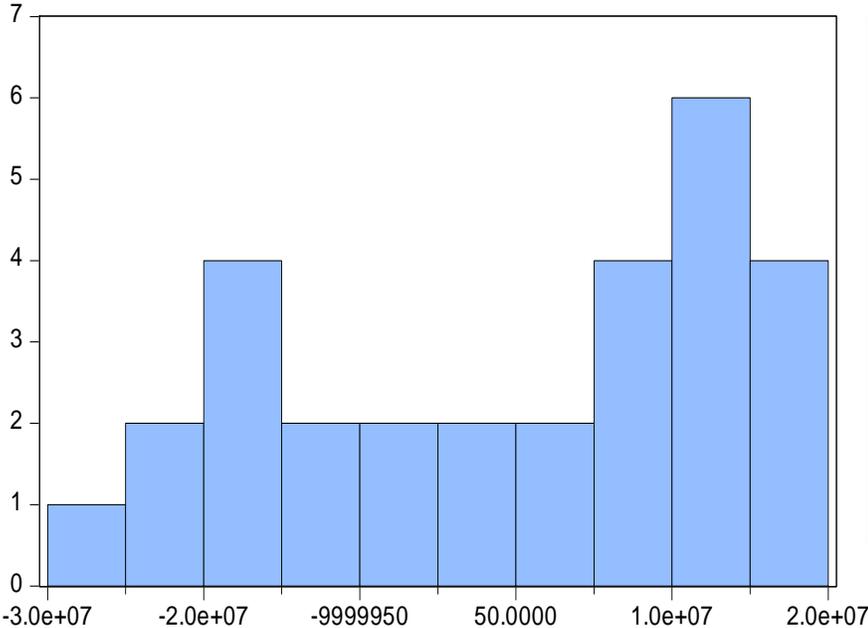
Lampiran 1

DAFTAR DATA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PDRB
DI SUMATERA UTARA

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)
1986	186.463	26.665.409
1987	205.200	30.336.268
1988	290.355	33.761.169
1989	267.150	36.369.447
1990	313.900	38.582.281
1991	336.900	40.370.436
1992	383.200	44.791.379
1993	458.700	51.291.832
1994	515.600	57.430.761
1995	584.000	59.679.064
1996	660.800	62.807.524
1997	771.000	70.007.744
1998	342.600	64.411.614
1999	449.000	64.330.882
2000	416.800	69.154.112
2001	916.200	71.908.359
2002	1.021.300	75.189.140
2003	1.352.000	78.805.608
2004	1.501.500	83.328.948
2005	1.830.600	87.897.800
2006	2.184.600	93.347.400
2007	2.717.900	99.792.300
2008	2.967.300	106.172.600
2009	3.444.400	111.559.200
2010	3.833.100	118.640.000
2011	4.677.800	126.487.200
2012	7.633.500	134.463.900
2013	8.866.900	142.617.700
2014	8.525.300	149.989.100
2015	8.679.300	157.632.900

Lampiran 2

Hasil Uji Normalitas



Series: Residuals	
Sample 1986 2015	
Observations 29	
Mean	-1.36e-08
Median	3097320.
Maximum	19165234
Minimum	-27099013
Std. Dev.	14522865
Skewness	-0.388153
Kurtosis	1.736065
Jarque-Bera	2.658554
Probability	0.264668

Lampiran 3

Hasil Uji Persamaan Regresi

Dependent Variable: PDRB
 Method: Least Squares
 Date: 06/28/18 Time: 22:08
 Sample: 1986 2015
 Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51427121	3530828.	14.56517	0.0000
PP	12.53493	0.997702	12.56381	0.0000
R-squared	0.853935	Mean dependent var		79307734
Adjusted R-squared	0.848525	S.D. dependent var		37999621
S.E. of regression	14789362	Akaike info criterion		35.92319
Sum squared resid	5.91E+15	Schwarz criterion		36.01748
Log likelihood	-518.8862	Hannan-Quinn criter.		35.95272
F-statistic	157.8493	Durbin-Watson stat		0.226142
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews9

Estimation Command:

=====

LS PDRB C PP

Estimation Equation:

=====

PDRB = C(1) + C(2)*PP

Substituted Coefficients:

=====

PDRB = 51427121.049 + 12.5349313161*PP

Lampiran 4

Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51427121	3530828.	14.56517	0.0000
PP	12.53493	0.997702	12.56381	0.0000

Lampiran 5

Hasil Uji R Square (R^2)

R-squared	0.853935	Mean dependent var	79307734
Adjusted R-squared	0.848525	S.D. dependent var	37999621
S.E. of regression	14789362	Akaike info criterion	35.92319
Sum squared resid	5.91E+15	Schwarz criterion	36.01748
Log likelihood	-518.8862	Hannan-Quinn criter.	35.95272
F-statistic	157.8493	Durbin-Watson stat	0.226142
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6

DAFTAR t Tabel

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490

32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (22080) Faximile (0634) 24022

Nomor : B-174/ln. 14/G.6a/PP.00.9/07/2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kesediaan
Menjadi Pembimbing Skripsi

03 Juli 2018

Yth,
Bapak/Ibu
1. Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M.Si
2. Zulaika Matondang, M.Si
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Enti Seriani Siregar
Nim : 13 230 0010
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Lama : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1998-2014
Judul Baru : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015

Untuk itu kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui:



Dekan

Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Pt. Ketua Program Studi Jurusan
Ekonomi Syari'ah

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Zulaika Matondang, M.Si